



Banjir Bandang Gulung Nepal

Seorang wanita lanjut usia (lansia) dievakuasi menggunakan keruk ekskavator setelah terjebak lumpur pekat akibat banjir bandang dan tanah longsor yang dahsyat di Nuwakot, Nepal, Rabu (26/8/2026). Hingga Kamis (27/8/2026) sedikitnya 168 orang tewas dan lebih dari 1.300 lainnya masih hilang akibat banjir bandang di wilayah perbatasan Nepal-China, termasuk 260 warga negara asing. Sementara operasi pencarian dilakukan dengan dukungan helikopter dan drone. (EPA.ist)

GADUH DULU, DESIL DIUKUR ULANG BELAKANGAN

Pemerintah baru sibuk mengoreksi data desil setelah rakyat lebih dulu gaduh. Keluhan menyeruak ketika warga berpenghasilan pas-pasan mendapati diri mereka masuk desil 9 atau 10. Di Kulon Progo, misalnya, seorang penarik becak motor bernama Timbul, disebut berubah dari desil 1 menjadi desil 9. Padahal penghasilan bersihnya sekitar Rp40 ribu-Rp50 ribu per hari. Di Surabaya, mahasiswi Unesa Diandrea Fristi mengaku status desil keluarganya berubah dari desil 2 menjadi kelompok 6-10 dan berdampak pada pengajuan beasiswa. Diketahui, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3 per 10 Juli 2026 mencakup 290,13 juta individu dan 95,98 juta keluarga yang dikelompokkan dalam 10 desil. BPS pada 21 Agustus menjelaskan desil merupakan pemeringkatan relatif keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial dan ekonomi, bukan ukuran mutlak kaya atau miskin. Namun fakta di lapangan, data tersebut menjadi salah satu rujukan penargetan berbagai program pemerintah. Mulai dari subsidi Peralite, LPG 3 kilogram, bantuan sosial, KIP Kuliah hingga PBI JKN. Polemik pun meluas dari keluhan warga ke parlemen. DPR RI mengaku kebanjiran pengaduan terkait desil. Pemerintah ditegaskan sedang mengukur ulang parameter desil agar pemeringkatannya lebih tepat. Hal tersebut diakui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya sempat menyebut mengucurkan dana hingga Rp 7 triliun ke BPS untuk memperbaiki DTSEN. Meski kemudian, Kemenkeu meluruskan dana itu merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026, tidak hanya dikhususkan untuk sensus ekonomi. Ketika angka keliru digunakan untuk menentukan subsidi hingga kesempatan kuliah, siapa yang harus bertanggung jawab? SELINGKAPNYA DI HAL 11....

PEMBAGIAN KELOMPOK DESIL 1-10



Desil 1

10% kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah (sangat miskin).



Desil 2-4

Kelompok miskin hingga rentan miskin.



Desil 5-8

Kelompok tingkat kesejahteraan menengah. Kelompok tingkat kesejahteraan menengah.



Desil 9-10

20% kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi (mampu hingga sangat mampu)

+29,01 juta individu | **+9,59** juta keluarga (KK)

**JUMLAH
MASYARAKAT
DI SETIAP
DESIL**



Sumber : Berbagai Sumber Diolah

KPK GELEDAH BAPPENDA DAN BKPSDM BOGOR, USUT DUGAAN PEMOTONGAN INSENTIF PAJAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan upaya paksa dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Kamis (27/8/2026), penyidik menggeledah dua kantor pemerintah daerah, yakni Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan tersebut merupakan bagian dari lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. "Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bogor, pada hari ini (Kamis) penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor," kata Budi.

Penggeledahan pertama berlangsung di Kantor Bappenda Kabupaten Bogor. Setelah itu, penyidik yang didampingi kepolisian bergerak ke Kantor BKPSDM. Dari kedua lokasi tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara. Berdasarkan pengamatan Kompas.com, empat mobil penyidik dikerahkan dalam kegiatan tersebut. Sejumlah koper berukuran besar juga terlihat dibawa keluar dari area kantor Bappenda dan



BKPSDM.

Budi belum memerinci dokumen apa saja yang disita. KPK, kata dia, masih harus menelaah barang-barang yang diamankan untuk melihat keterkaitannya dengan perkara.

"Penyidik akan melakukan penelaahan atas temuan dalam penggeledahan tersebut," ujar Budi.

Hasil penelaahan nantinya akan menjadi bagian dari proses penyidikan untuk memperkuat konstruksi perkara.

Penggeledahan ini menjadi perkembangan terbaru setelah KPK sebelumnya mengamankan uang sekitar Rp1,5 miliar dalam rangkaian penyelidikan. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemotongan upah pungut di Bappenda Kabupaten Bogor. Pada 21 Agustus, KPK menyatakan perkara telah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan melalui surat perintah penyidikan (sprindik) umum.

Kenaikan status perkara itu terjadi setelah pada 20 Agustus beredar informasi mengenai operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kabupaten Bogor. Namun, lembaga antirasuah membantah telah melakukan OTT. Budi menyebut kegiatan KPK saat itu merupakan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak sebagai tindak lanjut laporan masyarakat. "Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat terkait kabar peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor, kami klarifikasi bahwa informasi tersebut tidak benar," kata Budi.

Sehari setelah membantah OTT, KPK mengumumkan bahwa penyelidikan di Kabupaten Bogor telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Budi menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah gelar perkara di tingkat pimpinan pada malam 20 Agustus. Meski perkara sudah masuk tahap penyidikan, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena KPK masih menggunakan sprindik umum dan membutuhkan kecukupan alat bukti.

"Belum ada kecukupan alat bukti untuk penetapan tersangka ataupun pihak-pihak yang kemudian bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut," ujar Budi. Ia sebelumnya juga menjelaskan bahwa uang Rp1,5 miliar diamankan ketika perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Uang tersebut selanjutnya akan diproses untuk penyitaan dalam tahap penyidikan.

Substansi perkara yang sedang dialami berkaitan dengan dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut yang semestinya diterima penuh pegawai Bappenda. KPK belum mengungkap siapa saja pihak yang diduga menerima uang tersebut maupun bagaimana aliran dan pembagiannya. (tin,ant,kum/dya)

Purbaya Janji Pembenahan Bea Cukai dan Pajak



MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembenahan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan terus dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan salah satu pejabat Bea Cukai sebagai tersangka dugaan korupsi.

Purbaya mengatakan perbaikan tata kelola tidak hanya menyasar Bea Cukai, tetapi juga Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurut dia, kedua institusi tersebut menjadi titik penting yang perlu dibenahi untuk menekan praktik korupsi sekaligus

meningkatkan kualitas penerimaan negara.

"Itu nanti kan kita sedang melakukan perbaikan Bea Cukai dan Pajak (DJP) ya. Jadi itu salah satu titik yang harus kita perbaiki ke depan," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026), dikutip Antara.

Purbaya berharap kasus korupsi di lingkungan dua institusi tersebut dapat semakin berkurang. Ia mengakui praktik korupsi tidak mungkin langsung hilang sepenuhnya, tetapi pemerintah harus terus mengarah pada kondisi tersebut agar pengumpulan

pajak semakin optimal dan kepercayaan wajib pajak meningkat.

"Ke depan saya harapkan hal-hal seperti itu tidak terulang lagi atau semakin berkurang lah. Enggak mungkin menuju nol, tapi menuju nol sehingga tax collection rate kita bisa meningkat, dan orang yang bayar pajak pun rela bayar pajak karena uangnya enggak dibuat main-main," ujarnya.

Pernyataan Purbaya muncul setelah KPK menahan Gatot Heroe Hernanda, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, dalam perkara dugaan suap terkait importasi barang. Gatot ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/8/2026). KPK menduga Gatot menerima uang sekitar Rp3,25 miliar.

Perkara tersebut merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan Bea Cukai yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta. Selain Gatot, KPK menetapkan Rizal, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat yang sebelumnya menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai periode 2024 hingga Januari 2026, sebagai tersangka. (tin,ist/dya)

DASCO SIAP MUNDUR JIKA RUU PERAMPASAN ASET GAGAL DISAHKAN 15 DESEMBER

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan surat pernyataan kesiapan mengundurkan diri jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen itu muncul setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) meminta DPR tidak sekadar membuat target, tetapi memberikan konsekuensi apabila janji tersebut kembali meleset.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco sesuai menerima audiensi perwakilan AMPB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Ia mengatakan surat itu dibuat langsung setelah tuntutan AMPB disampaikan.

"Saat tadi [tuntutan AMPB] disampaikan, saya suruh [staf pimpinan] mulai mengetik. Dan, ini [surat pernyataan siap mundur] sudah jadi dan tinggal [ditandatangani]," kata Dasco sambil menunjukkan dokumen tersebut. Komitmen itu kemudian dituangkan secara tertulis dan ditandatangani pimpinan DPR.

Sebelumnya, DPR melalui rapat paripurna pada Kamis menetapkan 15 Desember 2026 sebagai batas paling lambat pengesahan RUU Perampasan Aset. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan target tersebut kepada peserta rapat paripurna dan mendapat persetujuan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhan menjelaskan pembahasan beleid tersebut membutuhkan waktu karena RUU



Perampasan Aset merupakan regulasi baru secara substansi, bukan sekadar revisi dari undang-undang yang sudah ada.

Habiburokhan mengatakan pembahasan RUU telah dimulai sejak 16 September 2025 setelah Komisi III menugaskan Badan Keahlian DPR menyusun naskah akademik dan draf. Dalam proses penyusunannya, Komisi III mengaku telah memanggil 50 narasumber,

melakukan kunjungan kerja ke tiga daerah, serta meminta 46 anggota Komisi III menyerap aspirasi dari daerah pemilihan masing-masing. Komisi III juga telah menggelar 35 rapat dengar pendapat umum (RDPU) dan menerima masukan tertulis dari berbagai kelompok masyarakat.

Namun, AMPB tidak puas hanya dengan tenggat waktu. Koordinator AMPB

PASAL-PASAL YANG DIKRITISI

- **Pasal 5 ayat 2:** Norma illicit enrichment atau kekayaan tak wajar pejabat disebut dihapus dari draf DPR. Kritiknya, aturan ini bisa melemahkan upaya merampas harta tak sah.
- **Pasal 2, 3, dan 6:** Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) diperdebatkan. Draf DPR mempersempit perampasan tanpa putusan pidana hanya untuk kondisi tertentu, seperti pelaku meninggal, sakit permanen, melarikan diri, atau perkara tak dapat disidangkan.
- **Pasal 6 ayat 1:** Aset minimal Rp100 juta dapat dirampas jika terkait tindak pidana dengan ancaman 4 tahun penjara atau lebih. Ambang ini dinilai berpotensi menasar kejahatan konvensional kecil.
- **Pasal 50:** Lembaga pengelola aset hasil rampasan dinilai belum jelas. Kondisi ini dikhawatirkan memicu tumpang tindih kewenangan antarpengadilan.

**Kritik utama: Koalisi masyarakat sipil dan akademisi menilai draf DPR mengalami pelemahan substansi dibandingkan draf pemerintah 2023.*

Demo Memanas: Water Cannon hingga Gas Air Mata di Pejompongan



AKSI demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026), yang sejak siang sempat mereda setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memperoleh komitmen DPR terkait RUU Perampasan Aset, kembali memanas menjelang malam.

Massa dari sejumlah kelompok masih bertahan di sekitar kompleks parlemen ketika aparat mulai mendorong mereka menjauh dari

gerbang DPR.

Situasi semula relatif tenang. Massa yang terdiri atas mahasiswa, pengemudi ojek online, pelajar, dan kelompok lainnya memadati kawasan depan Gedung DPR hingga mendekati flyover Jalan Gerbang Pemuda. Namun, berdasarkan pantauan, aparat dari dalam kompleks parlemen kemudian menyemprotkan air ke arah massa menggunakan water cannon. Semprotan awalnya tidak terlalu deras,

tetapi intensitasnya meningkat sehingga massa yang berada paling dekat dengan gedung mulai bergerak mundur.

Kepanikan muncul ketika sejumlah orang tiba-tiba berlari ke arah belakang kerumunan. Teriakan, "Woy woy jangan lari," sempat terdengar dan membuat sebagian massa menghentikan langkah. Namun tak lama kemudian massa kembali berlari. Kendaraan polisi terlihat bergerak mendekati kerumunan, sementara jalur menuju flyover dijaga personel kepolisian yang membentuk barisan dengan tameng. Pengamanan setidaknya terlihat di dua titik, yakni gerbang samping Senayan Park dan tikungan Jalan Gerbang Pemuda.

Sekitar pukul 19.01 WIB, dua mobil water cannon dikerahkan untuk memukul mundur massa. Polisi juga meminta peserta aksi membubarkan diri. "Kita mohon segera pulang. Pulang dengan selamat dan aman," ujar seorang polisi dari mobil Raisa. Setelah penyemprotan, massa terpecah dan bergerak menjauh ke arah Slipi serta Senayan. (gus,kcm,sua/dya)

Supriyono alias Botok meminta komitmen tersebut memiliki konsekuensi politik apabila DPR gagal memenuhi janji. Dalam audiensi, ia mempertanyakan kesediaan pimpinan DPR untuk mundur apabila RUU Perampasan Aset belum disahkan pada 15 Desember.

"Seandainya tanggal 15 Desember RUU itu tidak disahkan, tanggung jawab Anda apa? Apakah Anda siap untuk mengundurkan diri jika RUU tersebut tidak disahkan?" ujar Botok.

Pemintaan itu kemudian masuk ke dalam surat komitmen pimpinan DPR. Dalam dokumen tersebut, pimpinan DPR menyatakan berkomitmen menyelesaikan pembentukan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Mereka juga menyatakan kesiapan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan sekaligus sebagai anggota DPR apabila hingga batas waktu tersebut RUU tidak disahkan dalam rapat paripurna. Pernyataan itu diteken Dasco dan disaksikan perwakilan AMPB.

Dasco menyebut DPR tidak mempersoalkan tuntutan tersebut karena parlemen telah berkomitmen menyelesaikan RUU sesuai tenggat. "Pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tepat waktu. Menurut kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian," katanya. (gus,ant,kcm/dya)

Di Tahura Raden Soerjo, kebakaran telah menghancurkan 334,94 hektare lahan. Kepala UPT Tahura Raden Soerjo, Agustiningtyas Marini, merinci 274 hektare berada di wilayah Kabupaten Pasuruan dan sekitar 60 hektare masuk

Karhutla Masih Mengepung Jatim

ARJUNO-WELIRANG TERBAKAR 334 HA,
SEMERU-BROMO KEMBALI BERASAP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan upaya paksa dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Kamis (27/8/2026), penyidik mengeledah dua kantor pemerintah daerah, yakni Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.



Kondisi tersebut menunjukkan karakter kebakaran di kawasan pegunungan yang sulit ditangani. Medan terjal dan cuaca menjadi kendala utama. Operasi pemadaman Arjuno-Welirang sebelumnya sempat menggunakan helikopter water bombing. Namun, pada Kamis pagi penyiraman hanya dilakukan dua kali sebelum operasi udara dihentikan karena cuaca ekstrem. Helikopter kemudian dialihkan untuk membantu penanganan kebakaran di Blok Ranu Kembang, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Pemadaman Arjuno-Welirang selanjutnya mengandalkan personel darat dan penggunaangebyok.

Kebakaran Arjuno-Welirang sendiri mengalami perkembangan berulang sepanjang Agustus. Pada 22 Agustus, pemetaan periode 18-21 Agustus mencatat area terdampak 146,85 hektare. Namun, setelah muncul titik api baru dan kebakaran kembali meluas, angka tersebut meningkat menjadi 334,94 hektare. Sebelumnya, operasi water bombing juga telah dilakukan delapan sortie dengan total 8.000 liter air hingga 25 Agustus.

Ancaman serupa terjadi di kawasan Semeru. Kebakaran di Blok Ranu Kembang membuat Balai Besar TNBTS menutup total jalur pendakian Gunung Semeru mulai 26 Agustus sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pada Kamis, titik api kembali terpantau di Ranu Kembar, kawasan yang berada di atas Ranu Kumbolo. BPBD Lumajang bersama petugas TNBTS melakukan pemadaman sekaligus penyekatan agar api tidak merambat ke kawasan hutan lain. Penyebab kebakaran masih diselidiki.

Kebakaran Semeru juga berdampak langsung kepada pendaki. Sebanyak 172 orang yang sebelumnya berada di Ranu Kumbolo dievakuasi menuju Ranupane dengan pendampingan petugas dan Pemandu Pendakian Gunung Semeru Terdaftar (PPGST). Sebagian besar telah tiba di Ranupane dan dilaporkan aman. Pranata Humas TNBTS Endrip Wahyutama menjelaskan Ranu Kumbolo merupakan satu-satunya lokasi camping ground di Gunung Semeru. "Sehingga, tidak ada lokasi (perkemahan) lainnya," katanya. (san,wid,ist/dya)

10 PERUSAHAAN DENGAN
HOTSPOT KARHUTLA TERBANYAK
DI KALIMANTAN

1.897 hotspot PT Hutan Ketapang Industri (Ketapang, Kalbar)

1.066 hotspot PT Inhutani I Unit Labanan (Berau, Kaltim)

979 hotspot PT Grace Putri Perdana (Lamandau, Kalteng)

971 hotspot PT Kiani Lestari (Kutai Timur, Kaltim)

914 hotspot PT Finnantara Intiga (Sanggau, Kalbar)

877 hotspot PT Wanakerta Ekalestari (Ketapang, Kalbar)

774 hotspot PT Mohairson Pawan Khatulistiwa (Ketapang, Kalbar)

712 hotspot PT Prima Bumi Sentosa (Ketapang, Kalbar)

695 hotspot PT Inhutani III Unit Nanga Pinoh (Melawi, Kalbar)

640 hotspot PT Inhutani I Unit Samarata (Berau, Kaltim)

KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah Indonesia. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan ribuan titik panas terdeteksi di Kalimantan dan Sumatra, dengan Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi wilayah dengan jumlah hotspotterbanyak.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, mengatakan jumlah hotspot di Kalimantan Barat (Kalbar) bertambah 215 titik dibandingkan hari sebelumnya. Dengan kenaikan tersebut, total hotspot di Kalbar mencapai 2.825 titik. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap jarak pandang yang turun hingga kurang dari 1 kilometer.

Kota Batu. "Totalnya 334,94 hektare. Sebanyak 274 hektare masuk wilayah Pasuruan dan 60 hektare berada di kawasan Kota Batu," kata Agustiningtyas di Malang, Kamis (27/8/2026)..

Api di Arjuno-Welirang belum sepenuhnya terkendali. Dari pemantauan terakhir, titik api yang

sebelumnya berada di kawasan Lali Jiwo mulai bergerak menuju Banyu Kuning. Api merambat dari bagian atas bukit menuju kawasan yang lebih rendah. "Saat ini api terpantau masih ada di kawasan Lali Jiwo dan mulai masuk Banyu Kuning, bergerak dari atas bukit menuju ke bawah," ujarAgustiningtyas.

Hotspot Terus Bertambah Jadi 3.947 Titik

"Untuk situasi terkini, di mana di Kalimantan Barat jumlah hotspot naik meningkat sebanyak 215, sehingga hotspot yang ada saat ini menjadi 2.825. Kemudian jarak pandang di bawah 1 km," ujar Berton dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB, Kamis (27/8/2026).

Lonjakan lebih besar terjadi di Kalteng. BNPB mencatat terdapat tambahan 1.837 hotspot dalam sehari. Jumlah titik panas di provinsi tersebut kini mencapai 3.947 titik. Meski jumlah hotspot meningkat tajam, jarak pandang di wilayah Kalteng dilaporkan masih berada di sekitar 4 kilometer.

"Kemudian untuk Kalimantan Tengah, hotspot juga naik sebesar 1.837 menjadi 3.947, jarak pandang sebesar 4 km," kata Berton.

Kenaikan hotspot juga tercatat di Kalimantan Selatan. Dibandingkan data pada Rabu (26/8), jumlah titik panas di provinsi tersebut bertambah

262 titik. Total hotspot Kalimantan Selatan kini mencapai 1.079 titik, meski jarak pandang masih relatif baik, yakni di atas 7 kilometer.

Sementara itu, tren berbeda terlihat di Sumatra Selatan. Jumlah hotspot di provinsi tersebut turun 263 titik dibandingkan hari sebelumnya. Meski demikian, masih terdapat 1.175 titik panas yang terdeteksi. Jarak pandang di wilayah Sumatra Selatan tercatat mencapai 8 kilometer.

Penurunan juga terjadi di Riau dan Jambi. BNPB mencatat hotspot di Riau berkurang 157 titik sehingga tersisa 68 hotspot. Di Jambi, jumlah titik panas turun 92 sehingga saat ini terdapat 42 hotspot.

Perbedaan tren antarwilayah tersebut menunjukkan bahwa ancaman karhutla belum mereda secara merata. Sejumlah wilayah di Kalimantan justru mengalami peningkatan signifikan, sementara beberapa wilayah Sumatra mulai mencatat penurunan jumlah titik panas.(wid,ist/dya)

DARI 'JAS HIJAU' HINGGA MBG, PESAN PRABOWO DI MUKTAMAR NU

Presiden Prabowo Subianto membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026). Di hadapan ribuan muktamirin, Prabowo menyampaikan sejumlah capaian pemerintah sekaligus menegaskan bahwa dirinya tidak ikut mengatur pelaksanaan forum tertinggi NU tersebut.

Prabowo mengatakan kesempatan membuka Muktamar ke-35 NU merupakan kehormatan besar baginya. Ia menyebut NU sebagai institusi bersejarah yang memiliki jasa besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

"Saya tidak mengatur ini semua. Saya juga tidak mengerti, tapi ya, kita menerima ini semua," kata Prabowo dalam pidatonya.

Muktamar ke-35 NU sendiri berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Forum tersebut menjadi ruang permusyawaratan tertinggi NU untuk menentukan arah organisasi dan kepemimpinan lima tahun ke depan.

Dalam pidatonya, Prabowo mengaitkan sejarah NU dengan nasionalisme. Ia menyinggung lagu Syubbanul Wathon yang kini menjadi mars NU. Menurut dia, lagu tersebut menunjukkan bahwa kelompok religius sejak sebelum Indonesia merdeka telah memiliki semangat cinta Tanah Air.

"Lagu yang dibuat oleh kelompok religius, tapi semangatnya adalah semangat cinta Tanah Air dan semangat nasionalisme yang luar biasa," ujar Prabowo.

Ia kemudian menyebut lagu tersebut diciptakan KH Abdul Wahab Hasbullah belasan tahun sebelum Proklamasi 1945. Menurut Prabowo, pada masa itu bentuk dan nama negara Indonesia bahkan belum jelas, tetapi para pemimpin religius telah berani mengekspresikan semangat patriotisme melalui lagu tersebut.

Pujian Prabowo kemudian diarahkan kepada ulama dan pesantren dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ia menyinggung Pertempuran Surabaya pada Oktober-



Presiden Prabowo Subianto sungkem ke pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, KH Nurul Huda Djazuli di sela-sela pembukaan Muktamar NU yang digelar di Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026). (Dok.Setpres)

November 1945 sebagai salah satu episode penting yang menunjukkan besarnya peran kiai dan pesantren.

"Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan penghormatan saya kepada para kiai dan ulama karena kemerdekaan bangsa Indonesia memang diproklamasikan di Jakarta, tapi kemerdekaan bangsa Indonesia diuji di Surabaya," kata Prabowo.

"Dan dalam pertempuran Surabaya Oktober-November tahun 1945, peran dari ulama, peran dari kiai-kiai, peran dari pesantren sangat besar, Saudara-saudara."

Dari konteks itu, Prabowo memperkenalkan istilah "Jas Hijau", permainan kata dari ungkapan Bung Karno "Jas Merah" atau "jangan sekali-sekali melupakan sejarah". "Saya ingin menyampaikan 'Jas Hijau': jangan sekali-sekali melupakan jasa ulama," ujarnya. Ia secara khusus mengapresiasi kiai kampung yang menurutnya bekerja menjaga kehidupan sosial tanpa banyak mendapat sorotan.

"Terima kasih kepada semua ulama yang terkenal maupun kiai-kiai kampung yang mungkin namanya tidak pernah masuk televisi," kata Prabowo. "Mereka setiap hari menjaga akhlak anak-anak kita, menjaga kerukunan umat dan kerukunan antarumat, menjaga kedamaian di desa. Dan mendoakan bangsa tanpa meminta apa pun kepada negara," sambungnya.

Di hadapan forum NU, Prabowo juga menggunakan panggung tersebut untuk memaparkan sejumlah program pemerintah. Ia menyatakan pemerintahannya telah mencapai sejumlah "prestasi besar" sebelum genap dua tahun. "Belum sampai dua tahun kita telah mencapai prestasi-prestasi besar," kata Prabowo.

Salah satu yang diklaim ialah swasembada pangan. Ia juga mengatakan Indonesia dalam waktu dekat akan menuju swasembada energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak. "Insya Allah kita tidak dalam waktu yang tidak lama kita tidak perlu impor terlalu banyak BBM dari mana pun," ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari laporan capaian tersebut. Prabowo menyebut puluhan ribu dapur MBG telah dibangun dengan penerima manfaat lebih dari 62 juta orang. Namun, ia mengakui program tersebut masih menghadapi banyak persoalan. "MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut," kata Prabowo. Ia menegaskan manfaat

MBG ditargetkan menjangkau seluruh anak, ibu hamil, dan lansia.

Pernyataan itu disampaikan ketika pemerintah memang tengah menghadapi tuntutan pembenahan tata kelola MBG. Dalam pidatonya, Prabowo memperkenalkan kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dan menyatakan persoalan di lembaga tersebut akan diselesaikan. Ia juga menyebut puluhan ribu Koperasi Desa Merah Putih segera beroperasi. Pemerintah, kata dia, akan memastikan barang bersubsidi diterima masyarakat dengan harga sesuai subsidi.

"Barang subsidi tidak boleh diperdagangkan dan tidak akan diperdagangkan," tegasnya.

Pada bagian lain, Prabowo kembali menekankan pentingnya hubungan pemerintah dengan organisasi masyarakat Islam. Muktamar kali ini berlangsung di tengah perhatian besar terhadap relasi NU dengan kekuasaan serta dinamika internal organisasi. Sebelum kedatangan Presiden, panitia memang telah menyatakan Prabowo dijadwalkan membuka forum tersebut dan sejumlah menteri turut diundang.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya berharap Presiden Prabowo Subianto kembali membuka Muktamar NU lima tahun mendatang. Harapan itu disampaikan Gus Yahya saat pembukaan Muktamar ke-35 NU di Kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).

Gus Yahya mengatakan Muktamar ke-36 NU dijadwalkan berlangsung pada 2031. Ia kemudian melontarkan harapan agar Prabowo yang hadir sekaligus membuka Muktamar ke-35 kembali hadir dalam forum lima tahunan tersebut. "Lima tahun lagi kami akan muktamar lagi, muktamar ke-36 pada tahun 2031. Saya tidak tahu mungkin ini agak susah untuk diotak-atik untuk menjadi angka yang bagus. Tapi dalam hati saya, saya berharap semoga nanti dibuka oleh Presiden Prabowo lagi," kata Gus Yahya.

Sebelumnya, Gus Yahya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prabowo dalam forum tertinggi NU tersebut. Ia bahkan meminta Presiden membuka secara resmi Muktamar ke-35. "Bapak Presiden, kami sangat berbahagia, bergembira, dan sangat berterima kasih atas kehadiran Pak Presiden dan kami mohon Pak Presiden nanti membuka secara resmi muktamar ke-35 NU ini. Dan alhamdulillah otak-atik nomornya kelihatannya cocok semua," ujarnya. Pernyataan itu merujuk pada kebiasaan Prabowo mengaitkan angka dalam pidato-pidatonya. (ton,ant,rls,ist/dya)



Presiden Prabowo saat menyampaikan sambutan dan membuka Muktamar ke-35 NU di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, pada Kamis (27/8/2026).ist

Kota Malang Kucurkan **Tambahan Dana Rp8,5 M** untuk Pemeliharaan Infrastruktur

MALANG - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PPK) Kota Malang mendapat tambahan sebesar Rp8,5 miliar. Anggaran yang tertuang dalam dokumen Rancangan Hasil Pembahasan Banggar DPRD Kota Malang terkait Perubahan KUA-PPAS 2026 ini dialokasikan untuk pemeliharaan infrastruktur.

"Kalau untuk pemeliharaan infrastruktur itu sekitar Rp8,5 miliar," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPR-PPK) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, dikutip pada Kamis (27/8/2026).

Dikatakannya, pemanfaatan anggaran tersebut belum ditentukan secara rinci. Saat ini, pihaknya masih melakukan pemetaan terhadap kebutuhan infrastruktur yang akan menjadi sasaran penggunaan anggaran.

Menurut Dandung, cakupan infrastruktur yang dapat berkaitan dengan kebutuhan tersebut cukup

beragam. Di lingkungan DPUPR-PPK, antara lain mencakup jalan, saluran drainase, serta bangunan.

Namun, Dandung menegaskan tidak seluruh kebutuhan infrastruktur di Kota Malang menjadi kewenangan DPUPR-PPK. Karena itu, pemetaan masih dilakukan dengan mempertimbangkan kewenangan masing-masing perangkat daerah.

"Masih kami petakan. Karena tidak semuanya ada di kewenangan DPUPR. Infrastruktur nanti bisa jadi ada yang di Diknas, bisa jadi ada yang di Dinkes. Ini sedang kami petakan," katanya.

Dandung juga menjelaskan, tambahan sekitar Rp8,5 miliar untuk kebutuhan infrastruktur tersebut berasal dari SiLPA Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pemanfaatannya nantinya akan diarahkan untuk kebutuhan infrastruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan skema tersebut, kebutuhan pemeliharaan tidak hanya berpotensi

menyasar infrastruktur jalan. Dandung menyebut jalan dan jembatan termasuk di dalamnya, bersama dengan fasilitas infrastruktur lainnya.

Bahkan, apabila memungkinkan dan sesuai hasil pemetaan, kebutuhan infrastruktur pada sektor lainnya juga dapat menjadi bagian dari pemanfaatan anggaran tersebut.

Selain kebutuhan pemeliharaan yang telah dipetakan, Dandung juga memastikan anggaran tersebut dapat mencakup kebutuhan perbaikan jalan yang bersifat insidental.

Meski demikian, ia belum merinci ruas jalan maupun fasilitas mana saja yang akan mendapatkan penanganan.



Ilustrasi: Penembelan jalan di Jalan Bromo, Oro-oro Dowo Kota Malang. (Santi/Lentera)

Penentuan tersebut masih menunggu proses pemetaan kebutuhan dan penyesuaian dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah. (Santi/Dya)

Pemkab Malang Lirik Pembentukan Koperasi Migran



Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, Yudhi Hindharto. (Santi/Lentera)

MALANG - Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) asal Kabupaten Malang mencapai 3.578 orang sepanjang 2025. Di tahun ini trennya juga masih meningkat. Melihat potensi itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mulai melirik wacana pembentukan koperasi bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

Wali "Kalau yang masuk ke data kami, itu rata-rata CPMI. Sementara kalau yang pelaporan di kementerian,

kemudian ke P3MI itu mulai dari yang purna, yang stay di sana, ada juga yang CPMI," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, Yudhi Hindharto, Kamis (27/8/2026).

Dikatakannya, jumlah CPMI yang mendaftar melalui Disnaker mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, tercatat sebanyak 2.384 CPMI yang mendaftar melalui Disnaker Kabupaten Malang. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 3.578 CPMI pada 2025.

Sementara untuk 2026, Yudhi mengaku belum memiliki rekapitulasi secara keseluruhan. Namun, berdasarkan evaluasi sementara, jumlah CPMI tahun ini disebut cenderung kembali mengalami peningkatan. "Di 2026 ini ada peningkatan. Kami evaluasinya setiap tahun," katanya.

Meningkatnya jumlah CPMI tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat potensi pengembangan koperasi bagi PMI dan keluarganya di Kabupaten Malang.

Wacana tersebut sebelumnya disampaikan pemerintah pusat melalui kerja sama Kementerian Koperasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Secara nasional, kerja sama tersebut memang diarahkan untuk mendorong pembentukan koperasi pekerja migran, termasuk bagi CPMI hingga purna PMI.

Namun, untuk Kabupaten Malang, rencana tersebut belum masuk tahap tindak lanjut konkret. Pemkab masih menunggu adanya arahan resmi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

"Kalau sampai sekarang belum kami tindaklanjuti. Karena dari pusat juga belum ada Surat Edaran. Biasanya kalau sudah ada SE dari kementerian, kemudian dari Gubernur, baru akan ada tindak lanjut dari pemerintah kota/kabupaten," terang Yudhi.

Meski belum ada tindak lanjut

resmi, Pemkab Malang menilai pembentukan koperasi PMI memiliki potensi jika memang dibutuhkan oleh para pekerja migran maupun calon pekerja migran.

Terlebih, menurut Yudhi, aspirasi mengenai kebutuhan koperasi tersebut datang dari kalangan CPMI maupun PMI yang telah menyelesaikan masa kerjanya di luar negeri. "Kalau memang dari teman-teman calon PMI maupun yang sudah purna, itu mereka menginginkan perlu ada," katanya.

Lebih lanjut, selain wacana koperasi, Yudhi menyebut pihaknya selama ini juga memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan kepada CPMI dan PMI.

Dikatakannya, Disnaker menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan sosialisasi mengenai literasi keuangan kepada pekerja migran maupun calon pekerja migran. "Kalau di kami, kami dengan OJK sudah sering melakukan sosialisasi terkait literasi keuangan dan sebagainya," katanya. (Santi/Dya)

AS JUAL RUDAL KE KORSEL, KORUT ANCAM PEMBALASAN

Tensi di Semenanjung Korea kembali naik. Korea Utara (Korut) mengecam persetujuan Amerika Serikat (AS) atas kemungkinan penjualan rudal udara-ke-udara AIM-9X Sidewinder kepada Korea Selatan (Korsel). Pyongyang mengancam memberikan "respons serius, segera, dan kuat". Ancaman itu muncul ketika Presiden AS Donald Trump tengah mencoba membuka kembali jalur perundingan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

SPESIFIKASI F-15 EAGLE CREST

- Asal Negara: Amerika Serikat (United States)
- Harga : \$30 Juta USD
- Gaya Dorong : 23.770 lbf
- Kecepatan Maksimum: 2.655 km/jam
- Ketinggian Maksimum: 65.000 kaki (ft)
- Kecepatan Tanjak: 67.050 kaki per menit (ft/min)
- Persenjataan: 1 x kanon M61A1
Vulcan ukuran 20 mm (menyimpan 940 peluru)
- Jangkauan Terbang : 5.600 km
- Landas Maksimum: 30.844 kg



NAMA Indonesia tercantum dalam kontrak Departemen Perang Amerika Serikat dengan Boeing untuk program F-15 Eagle Crest. Kontrak tersebut mencakup pekerjaan pemeliharaan, peremajaan, avionik, produksi, serta pembangunan kemampuan pemeliharaan untuk mendukung pengoperasian sistem senjata F-15. Dalam pengumuman kontrak pada Selasa (25/8/2026), Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang masuk skema Foreign Military Sales (FMS).

Departemen Perang AS menyebut kontrak itu mencakup FMS untuk

Kementerian Luar Negeri Korea Utara melalui pernyataan yang disiarkan kantor berita pemerintah Korean Central News Agency (KCNA), Kamis (27/8/2026), mengatakan Pyongyang tidak bisa mengabaikan dampak penjualan senjata AS terhadap keamanan kawasan.

"Kami tidak dapat mengabaikan

dampak buruk penjualan senjata AS kepada ROK terhadap lingkungan keamanan kawasan," kata juru bicara kementerian tersebut. ROK atau Republik Korea merupakan nama resmi Korea Selatan.

Pemerintah AS sebelumnya menyetujui kemungkinan penjualan 103 rudal taktis AIM-9X Sidewinder Block II, 10 unit pemandu taktis,

Indonesia Masuk Kontrak F-15 AS

Jepang, Israel, Arab Saudi, Korea Selatan, Singapura, Indonesia, dan Polandia. Mekanisme FMS memungkinkan pemerintah AS memfasilitasi pengadaan persenjataan bagi pemerintah negara lain. Artinya, penyebutan Indonesia dalam kontrak tersebut tidak sama dengan bukti bahwa pemerintah Indonesia telah membeli atau menerima pesanan F-15 melalui kontrak itu.

Nilai kontrak yang dilaporkan mencapai US\$131,23 miliar atau lebih dari Rp2.000 triliun. Pekerjaan akan dilakukan di St. Louis, Missouri, dan ditargetkan rampung pada Agustus 2037. Periode pemesanan kontrak berlangsung hingga 24 Agustus 2031 dengan opsi perpanjangan sampai 24 Agustus 2036.

Kontrak tersebut menggunakan mekanisme pengadaan satu sumber atau *sole source*.

Indonesia memang telah lama

menjadi salah satu negara yang dibidik Boeing untuk F-15EX. Pada Februari 2022, Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui kemungkinan penjualan hingga 36 pesawat F-15ID kepada Indonesia dengan nilai estimasi US\$13,9 miliar. Paket yang diusulkan saat itu juga mencakup mesin, radar AESA, sistem peperangan elektronik, sistem penjejak sasaran, serta berbagai perlengkapan pendukung.

Ketertarikan itu berlanjut pada 2023 ketika Menteri Pertahanan saat itu, Prabowo Subianto, menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan dan Boeing di fasilitas perusahaan tersebut di St. Louis. Indonesia ketika itu mengincar F-15EX, varian modern F-15 yang direncanakan memperoleh konfigurasi khusus untuk Indonesia dengan penamaan F-15IDN. (*wid,rtr/dya*)

serta perlengkapan pendukung kepada Korea Selatan dengan nilai sekitar US\$125 juta. Persetujuan itu merupakan bagian dari upaya memperkuat kemampuan pertahanan Seoul. AIM-9X merupakan rudal udara-ke-udara yang dirancang untuk digunakan pesawat tempur dalam menghadapi sasaran udara.

Bagi Pyongyang, paket persenjataan tersebut bukan sekadar transaksi militer. Korea Utara menilai penguatan kemampuan tempur Korea Selatan, ditambah meningkatnya integrasi militer AS dan sekutunya di kawasan Asia-Pasifik, memperburuk lingkungan keamanan.

"Sekarang setelah integrasi militer AS dan sekutunya dipercepat di kawasan Asia-Pasifik, kami tidak dapat mengabaikan dampak buruk penjualan senjata AS kepada ROK terhadap lingkungan keamanan regional," kata juru bicara tersebut. Pyongyang kemudian menegaskan akan memberikan "respons serius, segera, dan kuat" terhadap berbagai tindakan yang dianggap bermusuhan.

Kecaman itu juga diarahkan pada kebijakan Washington di luar urusan persenjataan. Korea Utara mempersoalkan rencana pemerintah AS mendanai program untuk mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia dan mengumpulkan informasi mengenai kondisi di negara tersebut.

Departemen Luar Negeri AS sebelumnya membuka kompetisi pendanaan bagi organisasi yang menjalankan proyek dokumentasi pelanggaran HAM dan upaya melawan monopoli informasi pemerintah Korea Utara. Washington menyiapkan dana hingga sekitar US\$2,96 juta untuk program tersebut. Pyongyang menyebut kebijakan itu sebagai ancaman baru yang ditujukan untuk menciptakan ketidakstabilan dalam sistem sosialnya.

Peringatan terbaru Pyongyang datang di tengah serangkaian sinyal yang saling bertolak belakang dari Washington. Trump dalam beberapa pekan terakhir kembali menyatakan keinginannya bertemu Kim Jong Un tahun ini. Gedung Putih juga mengurangi skala latihan militer bersama AS-Korea Selatan, termasuk latihan tahunan Ulchi Freedom Shield, sebagai bagian dari pendekatan yang lebih lunak terhadap Pyongyang. Trump bahkan menyebut hubungan personalnya dengan Kim sebagai salah satu modal diplomasi. Namun, Korea Utara belum menunjukkan minat yang sama untuk segera kembali ke meja perundingan. (*gus,cna,rtr,ist/dya*)

HP Terasa Bergetar Padahal Tak Ada Notif? Waspada Phantom Vibration Syndrome

Pernah sedang berjalan, duduk, bekerja, atau bersantai lalu tiba-tiba merasa ponsel di saku celana bergetar? Refleks tangan pun langsung merogoh saku untuk mengecek layar. Namun, setelah ponsel dikeluarkan, ternyata tidak ada pesan, panggilan, maupun notifikasi baru.

Jika pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Fenomena tersebut dikenal sebagai phantom vibration syndrome (PVS), yakni sensasi seolah-olah ponsel bergetar meski sebenarnya tidak ada getaran yang masuk.

Fenomena ini telah lama menarik perhatian peneliti karena cukup banyak dialami pengguna telepon seluler. Studi terhadap 290 mahasiswa sarjana di Amerika Serikat menemukan 89 persen responden pernah mengalami getaran ponsel semu. Rata-rata sensasi tersebut muncul sekitar dua minggu sekali. Meski demikian, hanya sebagian kecil yang menganggapnya mengganggu.

Dalam studi yang menjadi rujukan tersebut, sekitar 40 persen mahasiswa bahkan melaporkan mengalami sensasi getaran semu setidaknya sekali dalam sepekan. Artinya, pengalaman merasakan ponsel bergetar tanpa adanya notifikasi bukanlah kejadian yang langka di tengah kebiasaan masyarakat yang semakin lekat dengan perangkat digital.

Psikolog dari California State University, Dr Larry Rosen, mengaitkan fenomena tersebut dengan apa yang disebutnya sebagai kecemasan digital. Menurut dia, kebiasaan terus menunggu pesan, panggilan, atau interaksi di media sosial dapat membuat otak berada dalam kondisi selalu mengantisipasi kedatangan notifikasi.

"Tubuh kita selalu berada dalam kondisi menunggu dan mengantisipasi interaksi teknologi, yang biasanya berasal dari ponsel pintar," kata Larry, seperti dikutip Psychology Today.

Dalam kondisi tersebut, rangsangan fisik yang sebenarnya sangat sederhana bisa ditafsirkan secara berbeda oleh otak.

"Dengan kecemasan antisipatif tersebut, ketika kita mendapatkan stimulasi neurologis apa pun, misalnya celana yang bergesekan dengan kaki, kita dapat menafsirkannya melalui kecemasan tersebut sebagai, 'Oh, ponsel saya bergetar'," ujarnya.

Dengan kata lain, tidak selalu ada sesuatu yang salah dengan ponselnya. Bisa jadi, otak sudah begitu terbiasa menunggu sinyal dari perangkat tersebut

sehingga rangsangan kecil dari tubuh atau pakaian terasa seperti notifikasi.

Istilah phantom vibration syndrome memang populer digunakan untuk menggambarkan fenomena tersebut. Namun, literatur ilmiah juga mengingatkan bahwa istilah "syndrome" tidak sepenuhnya tepat secara medis. Fenomena ini lebih tepat dipahami sebagai pengalaman persepsi ketika seseorang merasa perangkatnya bergetar meskipun sebenarnya tidak.

Fenomena serupa juga ditemukan pada kelompok pekerja kesehatan. Sebuah penelitian terhadap tenaga medis menemukan sekitar 68 persen responden pernah mengalami phantom vibration. Studi lain pada dokter muda bahkan menemukan prevalensi yang lebih tinggi. Pada penelitian terhadap mahasiswa kedokteran yang menjalani masa magang, 78,1 persen mengalami sensasi tersebut pada awal penelitian dan angkanya meningkat menjadi 95,9 persen setelah tiga bulan.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan membawa ponsel, mengaktifkan mode getar, serta tingginya intensitas komunikasi digital dapat menjadi bagian dari konteks munculnya sensasi tersebut. Pada sebuah penelitian terhadap mahasiswa kedokteran, misalnya, 96 persen responden menggunakan fungsi getar pada ponsel.

Sekitar 70 persen mengaku menerima rata-rata lebih dari 10 panggilan atau pesan setiap hari. Penelitian yang sama juga menemukan 59 persen peserta memiliki tingkat stres tinggi berdasarkan ukuran yang digunakan dalam studi tersebut.

Masalahnya bukan semata-mata pada sensasi bergetar. Kebiasaan terus-menerus menunggu notifikasi juga dapat membuat perhatian seseorang semakin terikat pada perangkat.

Larry Rosen sebelumnya menjelaskan bahwa pengguna berat smartphone dapat mengalami peningkatan kecemasan ketika tidak dapat mengakses ponselnya. Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai bagian dari kecemasan yang terbentuk akibat keterikatan dengan komunikasi elektronik, termasuk pesan dan media sosial.

Dalam konteks inilah sensasi getaran palsu menjadi menarik. Ketika seseorang terbiasa segera memeriksa ponsel setiap kali ada rangsangan, otak seolah belajar bahwa sensasi tertentu dari area tubuh dekat saku berarti ada sesuatu yang perlu diperiksa.

Padahal, rangsangan itu bisa saja berasal dari gesekan kain dengan kulit, gerakan tubuh, tekanan pakaian, atau sensasi kecil lain yang sebenarnya tidak berhubungan dengan ponsel. (far/ist/dya)

Pencegahan Phantom Vibration Syndrome

1. Kurangi ketergantungan pada notifikasi dengan mematikan notifikasi yang tidak penting.
2. Batasi frekuensi mengecek ponsel dan hindari kebiasaan memeriksa layar setiap beberapa menit.
3. Matikan mode getar jika tidak benar-benar diperlukan, terutama saat sedang bekerja atau beristirahat.
4. Jangan selalu menyimpan HP di saku celana, terutama jika sensasi getaran palsu sering terjadi.
5. Buat waktu bebas ponsel (digital detox), misalnya saat makan, sebelum tidur, atau ketika sedang berkumpul dengan keluarga.



Hiu Jadi 'Sensor' Laut, Bantu Ilmuwan Prediksi Kekuatan Badai



Selama ini hiu lebih sering dikenal sebagai predator laut yang membuat manusia waspada. Namun, di tangan para ilmuwan, hewan tersebut kini mendapat peran yang sama sekali berbeda: menjadi pengumpul data untuk membantu memprediksi seberapa kuat badai sebelum mencapai daratan.

Peneliti dari University of Delaware, Amerika Serikat, memasang perangkat elektronik berukuran kecil pada sirip punggung sejumlah hiu. Sensor itu memungkinkan para peneliti memperoleh informasi mengenai kondisi laut ketika hiu berenang dan menyelam.

Data tersebut kemudian dikirim melalui satelit untuk membantu memperbaiki model kelautan, atmosfer, iklim, hingga prakiraan intensitas badai.

Mengapa Harus Hiu?

Pertanyaan itu mungkin muncul

ketika satelit, kapal penelitian, pelampung laut, dan perangkat robotik sudah digunakan untuk mengamati kondisi laut.

Jawabannya ada pada kemampuan hiu bergerak secara alami di berbagai kedalaman dan wilayah laut.

Sensor yang digunakan disebut CTD, singkatan dari conductivity, temperature and depth. Perangkat tersebut mengukur konduktivitas listrik air yang berkaitan erat dengan salinitas, sekaligus mencatat suhu dan kedalaman air ketika hiu bergerak.

Ketika hiu naik mendekati permukaan, sensor dapat berkomunikasi dengan satelit dan mengirimkan data yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, hiu pada dasarnya menjadi semacam "platform pengamatan laut" yang bergerak mengikuti pola alami hewan tersebut.

Bagian paling penting dari penelitian ini adalah panas yang

tersimpan di lapisan atas laut atau yang dikenal sebagai mixed layer.

Air laut yang hangat menyediakan energi bagi pembentukan dan penguatan badai tropis. Karena itu, mengetahui seberapa hangat lapisan laut dan seberapa dalam panas tersebut tersimpan menjadi salah satu informasi penting dalam memahami potensi intensifikasi badai.

"Warmer mixed layer equals stronger hurricane," kata Carlisle, seperti dikutip Reuters.

Artinya, bukan sekadar suhu permukaan yang menjadi perhatian. Peneliti ingin mengetahui kondisi vertikal laut, termasuk perubahan suhu dan salinitas pada kedalaman tertentu.

Informasi tersebut penting karena kondisi laut di bawah jalur badai dapat berubah secara cepat. Data yang lebih rapat dan langsung dari dalam laut berpotensi melengkapi informasi yang diperoleh dari satelit dan pelampung.

University of Delaware menjelaskan, kawasan Mid-Atlantic Bight memiliki kondisi laut yang sangat dinamis secara termal. Data dari hiu diharapkan membantu mengisi celah pengamatan yang selama ini sulit ditutup dengan sistem konvensional.

Empat Spesies Jadi Kandidat

Tidak sembarang hiu dapat dijadikan "sensor".

Para peneliti mencari spesies yang memiliki perilaku menyelam dan muncul ke permukaan yang sesuai untuk pengumpulan serta pengiriman data.

Bukan Pengganti Satelit dan

Pelampung

Sebuah penelitian yang diterbitkan pada 2026 menunjukkan potensi penggunaan sensor pada hiu untuk memperbaiki prakiraan kondisi laut. Penelitian yang dipimpin Laura H. McDonnell dari Woods Hole Oceanographic Institution mengintegrasikan data suhu dan kedalaman yang dikumpulkan hiu ke dalam model iklim musiman.

Hasilnya, kesalahan prakiraan suhu permukaan laut berkurang secara signifikan di beberapa wilayah yang dinamis, dengan peningkatan akurasi mencapai sekitar 40 persen. Para peneliti menekankan bahwa hiu bertag tidak akan menggantikan sistem pengamatan konvensional, melainkan memberikan pengamatan langsung tambahan dari wilayah yang sulit dijangkau.

Manfaat penelitian ini tidak berhenti pada urusan prakiraan cuaca.

Data yang dikumpulkan juga berpotensi membantu berbagai kebutuhan kelautan, mulai dari pengelolaan perikanan, keselamatan pelayaran, pemantauan ekosistem hingga perencanaan energi terbarukan di laut.

Jika sistem ini terus dikembangkan, masyarakat pesisir dapat memperoleh prakiraan badai yang lebih baik, terutama mengenai kemungkinan peningkatan intensitas badai sebelum mencapai daratan.

"Jika kami dapat menunjukkan bahwa hiu bisa membantu manusia, situasi ini akan menguntungkan kedua pihak," ujar Carlisle. (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI

OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)

PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)

download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com

VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAH | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Jangan Asal Layering, Ini Kombinasi Kandungan Skincare Pemicu Breakout

Rutinitas skincare yang panjang belum tentu membuat kulit semakin sehat. Alih-alih mendapatkan wajah lebih cerah dan mulus, terlalu banyak bahan aktif dalam satu waktu justru bisa membuat kulit terasa perih, kering, kemerahan, hingga muncul breakout.

Tren skin cycling dan rutinitas berlapis membuat berbagai kandungan aktif seperti retinol, AHA, BHA, vitamin C, dan benzoyl peroxide semakin mudah ditemukan dalam produk perawatan kulit. Masalahnya, tidak semua bahan tersebut ideal digunakan dalam rutinitas yang sama.

American Academy of Dermatology (AAD) mengingatkan bahwa penggunaan produk eksfoliasi ketika kulit sudah terpapar bahan seperti retinol atau benzoyl peroxide dapat memperburuk kekeringan dan bahkan memicu munculnya jerawat.

Retinol dan AHA/BHA

Retinol merupakan turunan vitamin A yang banyak digunakan untuk membantu mengatasi jerawat, pigmentasi, tekstur kulit, serta tanda-tanda penuaan. Sementara AHA dan BHA bekerja sebagai eksfoliator.

Ketiganya sama-sama memiliki efek aktif terhadap pergantian sel kulit. Ketika digunakan bersamaan, terutama pada kulit yang belum terbiasa, risiko kulit menjadi kering, mengelupas, merah, atau terasa terbakar dapat meningkat. AAD juga mencatat bahwa penggunaan retinoid atau retinol bersamaan dengan eksfoliasi dapat memperburuk iritasi.

Bukan berarti ketiganya sama sekali tidak boleh digunakan dalam satu rutinitas perawatan. Strategi yang lebih aman adalah mengatur waktunya. Misalnya, retinol digunakan pada malam tertentu, sementara AHA atau BHA digunakan pada malam berbeda.

Retinol dan Benzoyl Peroxide

Kombinasi ini cukup sering menjadi perhatian bagi pemilik kulit berjerawat. Retinol bekerja dengan meningkatkan pergantian sel kulit, sedangkan benzoyl peroxide digunakan untuk membantu menangani jerawat.

Masalahnya, keduanya dapat sama-sama menyebabkan kulit kering dan iritasi. Beberapa formulasi benzoyl peroxide juga dapat memengaruhi stabilitas jenis retinoid tertentu. Verywell Health memasukkan retinol dan benzoyl peroxide sebagai kombinasi yang perlu diperhatikan karena dapat meningkatkan kekeringan dan iritasi.

Bila keduanya memang dibutuhkan, penggunaannya dapat dipisahkan berdasarkan waktu atau hari. Namun, untuk produk obat jerawat atau retinoid resep, sebaiknya mengikuti petunjuk dokter karena kombinasi tertentu justru memang digunakan dalam terapi jerawat.

Retinol dan Vitamin C

Vitamin C merupakan antioksidan yang populer digunakan pada rutinitas pagi untuk membantu menangani kulit kusam dan kerusakan akibat paparan lingkungan. Retinol biasanya lebih sering digunakan pada malam hari.

Keduanya tidak otomatis menjadi kombinasi yang "haram" bagi semua orang. Namun, ketika

dipakai bersamaan, terutama dalam konsentrasi tinggi dan pada kulit sensitif, beban bahan aktif bisa membuat kulit lebih mudah mengalami iritasi. Karena itu, memisahkan waktunya menjadi pilihan sederhana.

AHA/BHA dan Vitamin C

AHA seperti glycolic acid dan lactic acid serta BHA seperti salicylic acid sama-sama memiliki fungsi eksfoliasi. Sementara itu, vitamin C dalam bentuk asam tertentu juga dapat memberikan efek aktif pada kulit.

Menggabungkannya dalam satu sesi bukan selalu berarti pasti menyebabkan masalah. Namun, pada kulit sensitif atau ketika konsentrasi bahan aktif cukup tinggi, kombinasi tersebut dapat meningkatkan risiko kering, perih, kemerahan, dan gangguan pada skin barrier.

AAD menyarankan pengguna mempertimbangkan produk yang sudah digunakan sebelum melakukan eksfoliasi karena sejumlah bahan aktif dapat membuat kulit lebih sensitif. Cara praktisnya adalah memisahkan penggunaannya. Vitamin C bisa ditempatkan dalam rutinitas pagi, sedangkan AHA atau BHA digunakan pada malam tertentu.

Benzoyl Peroxide dan Vitamin C

Benzoyl peroxide banyak digunakan untuk menangani jerawat, sedangkan vitamin C lebih dikenal sebagai antioksidan dan bahan pencerah. Keduanya dapat memberikan manfaat berbeda, tetapi menumpuk bahan aktif dalam satu rutinitas bukan selalu pilihan terbaik. Benzoyl peroxide dapat meningkatkan kekeringan dan iritasi.

AAD bahkan menyarankan pasien yang sedang menggunakan isotretinoin untuk menghindari benzoyl peroxide dan vitamin C karena kondisi kulit selama terapi tersebut menjadi lebih sensitif. (farist/dya)



Formula paling mudah untuk pemula:

Pagi:

Cleanser → Vitamin C (opsional) → Moisturizer → Sunscreen

Malam biasa:

Cleanser → Moisturizer

Malam retinol:

Cleanser → Moisturizer → Retinol → Moisturizer

Malam eksfoliasi:

Cleanser → AHA/BHA → Moisturizer

Gaduh Dulu, Desil...dari Hal 1

Kegaduhan soal data desil akhirnya membuat pemerintah membuka pintu koreksi. Warga yang mendapati dirinya tiba-tiba masuk kelompok desil 9 atau 10 ramai mempertanyakan hasil pemeringkatan kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Keluhan itu muncul karena angka di sistem dianggap tak selalu sejalan dengan kehidupan sehari-hari.

Pada Kamis (27/8/2026) Ketua Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengatakan pemerintah sedang melakukan kalibrasi ulang terhadap parameter ekonomi yang digunakan dalam DTSEN. "Pemerintah kan ingin memperbaiki dengan DTSEN. Dari DTSEN itu nanti perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan dan parameter-parameter sedang diukur ulang supaya lebih mengenal, lebih tepat," ujar Misbakhun di Jakarta.

Pernyataan itu datang setelah persoalan desil lebih dulu ramai di masyarakat. Salah satu kasus yang mencuat ialah Timbul, 49 tahun, pengemudi becak motor dari Lendah, Kulon Progo. Pada Januari 2026, keluarganya diketahui berada di desil 1.

Namun ketika ia mengurus surat keterangan tidak mampu untuk membantu biaya kuliah anaknya, statusnya berubah menjadi desil 9. Anak Timbul diterima di Universitas Negeri Yogyakarta melalui jalur mandiri dan membutuhkan sekitar Rp15 juta untuk biaya awal. Penghasilannya sebagai pengemudi becak motor pun tak menentu.

Timbul mengatakan penghasilan Rp100 ribu sehari belum tentu menjadi uang yang dibawa pulang karena masih dipotong biaya bensin dan kebutuhan lain. Bersihnya, menurut dia, sekitar Rp40 ribu-Rp50 ribu, bahkan sering tak mendapat penumpang.

Kasus Timbul bukan satu-satunya. Di Surabaya, mahasiswi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Diandrea Fristi, menjadi sorotan setelah data desil menghambat pengajuan beasiswa. Dalam pemberitaan Liputan6 pada Rabu, 26 Agustus, Diandrea mengatakan sebelumnya sempat tercatat desil 2, tetapi kemudian berubah menjadi kelompok desil 6 sampai 10. Padahal ia mengaku memenuhi persyaratan akademik.

"Pada semester 1 kan alhamdulillah IPK saya 4, saya berharap saya diterima (beasiswa), tapi ternyata tidak diterima. Terus akhirnya saya daftar lagi yang di semester 2, IPK saya turun jadi 3,95. Alhamdulillah desil saya 2. Cuma tiba-tiba desilnya itu jadi 6 sampai 10," kata Diandrea.

Keluhan kemudian merembet ke parlemen. Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana, yang mengatakan menerima banyak pengaduan terkait distribusi KIP Kuliah. Ia khawatir mahasiswa dari keluarga miskin justru kehilangan kesempatan kuliah gara-gara klasifikasi desil.

"Saya juga menerima banyak pengaduan terkait distribusi KIP Kuliah. Banyak calon mahasiswa yang datang dari keluarga miskin terancam gagal kuliah karena ketidakakuratan data desil," kata Bonnie.

Ia meminta pemerintah menyediakan mekanisme sanggah karena perubahan posisi desil dapat membuat keluarga yang masih kesulitan ekonomi terbaca sebagai kelompok yang lebih sejahtera.

Kekhawatiran serupa muncul pada sektor kesehatan. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah segera memeriksa perubahan desil yang berpengaruh terhadap kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional. "Kalau orang yang sebelumnya masuk kelompok penerima PBI JKN tiba-tiba naik desil tanpa perubahan kondisi ekonomi yang jelas, lalu kepesertaannya dinonaktifkan, ini harus segera diperiksa. Jangan sampai kesalahan data berujung pada hilangnya hak kesehatan masyarakat," kata Edy di Jakarta. Menurut dia, perubahan desil juga dapat berdampak terhadap bansos.

Desakan evaluasi bukan baru muncul hari ini. Pada 21 Agustus, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah membuka kemungkinan mengkaji kembali penentuan desil. Namun ketika itu pemerintah masih menunggu hasil Sensus Ekonomi 2026 yang sedang dilakukan BPS. "Itu kan (desil) di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi. Kami tunggu saja sensus ekonominya," kata Airlangga.

Pada hari yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan desil bukan ukuran mutlak kaya atau miskin. "Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi," kata Amalia dalam keterangan tertulis.

Penjelasan BPS itu penting, tetapi sekaligus menunjukkan letak persoalannya. Desil memang bukan label kekayaan absolut. BPS menggunakan berbagai karakteristik sosial-ekonomi dengan metode Proxy Means Test (PMT), antara lain kondisi rumah, sumber air, energi memasak, kepemilikan aset, listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan disabilitas. Setiap desil mencakup sekitar 10 persen keluarga. Desil 1 berada pada posisi

kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 paling tinggi. Per 10 Juli 2026, DTSEN versi 3 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.

Tetapi angka relatif itu kini punya konsekuensi yang sangat konkret. Pemerintah berencana menggunakan data desil sebagai salah satu basis kebijakan subsidi, termasuk rencana pembatasan Peralite untuk kelompok desil 9 dan 10. Karena itu, salah klasifikasi bukan berhenti sebagai persoalan statistik. Ia bisa bersentuhan dengan bensin bersubsidi, bansos, bantuan pendidikan sampai jaminan kesehatan.

Pemerintah sendiri mengakui data DTSEN masih diperbaiki. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan hal itu pada Rabu, 26 Agustus, sehari sebelum Misbakhun menyebut parameter sedang dikalibrasi. "Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya," ujar Purbaya. Ia berharap kualitas data tahun depan lebih baik.

Purbaya juga menyebut anggaran yang dikururkan untuk BPS "cukup banyak" dan mengaitkannya dengan DTSEN serta Sensus Ekonomi. Dalam pemberitaan 27 Agustus, sejumlah media menyebut angkanya hampir Rp7 triliun. Namun angka ini perlu diberi konteks, bukan Rp7 triliun khusus untuk memperbaiki data desil. Purbaya sendiri mengatakan, "Data DTSEN sama Sensus Ekonomi itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun, dengan macam-macam."

Diprotas Akademisi hingga Buruh

Kalangan akademisi pun sejak awal meminta persoalan ini tidak ditutup dengan penjelasan bahwa desil hanyalah peringkat relatif. Dosen FEB UGM Wisnu Setiadi Nugroho mengatakan desil 9 dan 10 memiliki rentang kondisi ekonomi yang lebar sehingga tidak semestinya dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan siapa yang berhak menerima atau kehilangan subsidi. Ia menyarankan desil dipakai sebagai penyaring awal dan digabungkan dengan faktor lain, termasuk kewajiban serta beban pengeluaran rumah tangga.

Sementara pakar ekonomi pembangunan UMY Susilo Nur Aji Cokro Darsono pada 21 Agustus mengingatkan pemetaan desil harus adaptif karena kondisi keluarga bisa berubah akibat kehilangan pekerjaan, perubahan pendapatan, bertambahnya tanggungan atau pengeluaran tak terduga.

Kritik bahkan masuk dari ruang digital. Komedian tunggal Dewangga Pribaditya mempertanyakan data desil keluarganya lewat video TikTok. Dewangga mengaku keluarganya masuk desil 10 meski pendapatannya pada bulan itu sekitar Rp1,5 juta.

"Padahal, bulan ini pemasukanku sekitar Rp1,5 juta, kok iso desil sepuluh, ini pemerintah cara ngitungnya gimana?" ujaranya dalam video tersebut.

Akademisi UGM sekaligus Direktur CELIOS Media Wahyudi Askar bahkan mengundang Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti untuk berdiskusi terbuka mengenai penentuan desil dan metodologi pengukuran kemiskinan. Ajakan itu disampaikan Media melalui akun Instagram pribadinya. "Desil itu bukan hanya soal angka," tulisnya.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah meminta pemerintah mengevaluasi pengelompokan desil dalam DTSEN setelah ditemukan sejumlah data yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi warga. Trubus menyoroti kasus penarik becak di Yogyakarta yang masuk desil 9, sementara seorang lurah justru berada di desil 8. "Ini menurut saya ada salah pendataan," kata Trubus, Kamis (27/8/2026). (wid,kum,dat,ist/dya)

STATUS DESIL MEMENGARUHI ASPEK-ASPEK UTAMA BERIKUT:

1. Bantuan Sosial (Bansos)

Desil 1-4 menjadi kelompok utama penerima bansos seperti PKH untuk ibu hamil, anak sekolah, disabilitas, dan lansia, serta BPNT/Kartu Sembako untuk kebutuhan pangan.

2. Beasiswa & Bantuan Pendidikan

Status desil memengaruhi penerima KIP Kuliah dan KIP/PIP untuk siswa SD hingga SMA/SMK. Keluarga yang masuk desil tinggi berisiko tidak memenuhi kriteria bantuan.

3. Jaminan Kesehatan Gratis

Status desil digunakan dalam penentuan penerima PBI JKN, sehingga iuran BPJS Kesehatan dibayar pemerintah. Jika masuk kelompok desil lebih tinggi, peserta dapat kehilangan bantuan dan harus membayar iuran sendiri.

4. Subsidi Energi & BBM

Data desil digunakan untuk menargetkan subsidi listrik, LPG 3 kg, serta BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Kelompok desil atas dapat dibatasi dari sejumlah subsidi.

5. Subsidi Perumahan

Status ekonomi berdasarkan desil turut menjadi pertimbangan dalam akses FLPP/BP2BT, yaitu fasilitas pembiayaan dan bantuan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.



PRAPERADILAN FEBRIE DITOLAK, STATUS TERSANGKA-PENYITAAN EMAS SAH

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Putusan itu membuat status tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan pencegahan terhadap Febrie yang diuji dalam perkara tersebut tetap dinyatakan sah secara hukum.

Hakim tunggal Richard Edwin Basoeki membacakan putusan perkara Nomor 134/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL pada Kamis (27/8/2026). “Mengadili, menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Richard dalam persidangan di PN Jakarta Selatan. Hakim juga membebaskan biaya perkara kepada Febrie dengan jumlah nihil.

Praperadilan jilid I ini menguji sejumlah tindakan hukum Polda Metro Jaya dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat Febrie. Objek yang dipersoalkan antara lain penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, hingga pencegahan bepergian ke luar negeri. Kejaksanaan Agung berstatus sebagai turut termohon dalam perkara tersebut.

Salah satu keberatan utama Febrie adalah anggapan bahwa penyidikan terhadap dirinya dilakukan secara tiba-tiba. Namun, hakim menilai proses tersebut telah berlangsung jauh sebelum penggeledahan pada Juli 2026. Richard menyatakan tidak menemukan keadaan bahwa perkara tersebut “tiba-tiba lahir pada tanggal 6 Juli 2026 tanpa proses pendahuluan”. Sebaliknya, kata dia, “telah terdapat rangkaian penyelidikan dan gelar perkara jauh sebelum tindakan penggeledahan dilakukan.”

Hakim merujuk Laporan Informasi Nomor LI/5/7/Res.3.3/2025/Kortas Tipikor tertanggal 6 Agustus 2025. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan fakta, keterangan, dokumen, informasi, dan bahan keterangan lain. Proses itu berlanjut ke gelar perkara pada 13 Januari 2026. Dari gelar perkara tersebut, penyidik menyimpulkan telah terdapat dugaan tindak pidana yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.

Karena itu, hakim menolak dalil bahwa penerbitan Sprindik Nomor SP.Sidik/2932/7/Res.3.3/2026 pada 6 Juli 2026 dilakukan tanpa penyelidikan. Jarak dua hari antara penerbitan Sprindik dan penggeledahan rumah Febrie di Sentul pada 8 Juli juga dinilai tidak otomatis menunjukkan penyidikan prematur. Menurut Richard, KUHP tidak menentukan batas waktu minimum



Massa menggelar demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (27/8/2026). Mereka meminta hakim menolak praperadilan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.ist

antara penerbitan Sprindik dan tindakan penggeledahan. “Yang menentukan adalah apakah tindakan penggeledahan dilakukan dalam rangka penyidikan yang telah melampaui dasar faktual dan hukum,” tegasnya.

Hakim juga menolak dalil bahwa Febrie semestinya diperiksa terlebih dahulu pada tahap penyelidikan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Richard menjelaskan, penyelidikan bertujuan mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan apakah perkara dapat dinaikkan ke tahap penyidikan.

“Penyelidikan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP tidak mensyaratkan bahwa orang yang kemudian menjadi tersangka harus terlebih dahulu diperiksa pada tahap penyelidikan,” ujarnya.

Persoalan lain yang diuji adalah penggeledahan rumah Febrie di Sentul, Bogor, serta barang-barang yang disita. Dalam persidangan, kubu Febrie sebelumnya mempersoalkan kesesuaian izin penggeledahan dengan lokasi rumah tersebut. Mereka bahkan menghadirkan empat ahli dan mengklaim menemukan sekitar 30 dugaan pelanggaran hukum acara yang mencakup penerbitan Sprindik, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, serta pencegahan ke luar negeri.

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, sebelumnya mengatakan, “30 pelanggaran hukum acara dan prinsip due process of law yang kami dalilkan sejak awal telah kami

buktikan melalui fakta persidangan, alat bukti dan keterangan para ahli.”

Menurut dia, penanganan perkara juga dinilai bersinggungan dengan sekitar 40 peraturan perundang-undangan, mulai dari UUD 1945, KUHP, KUHPA, UU TPPU, hingga aturan internal aparat penegak hukum.

Salah satu ahli yang dihadirkan kubu Febrie, M Arif Setiawan, bahkan menyatakan penggeledahan dapat dinilai tidak sah apabila dilakukan berdasarkan izin pengadilan yang tidak sesuai dengan lokasi. “Kalau menurut ahli ini tidak sah. Karena itu didasarkan kepada surat permohonan yang tidak benar, kemudian penetapannya tidak sesuai dengan apa yang dimohonkan,” kata Arif dalam persidangan. Namun, dalil tersebut tidak diterima hakim dalam putusan praperadilan.

Richard memang mengakui adanya persoalan terkait penyitaan foto keluarga Febrie. Menurut hakim, barang pribadi yang tidak memiliki hubungan dengan perkara tidak semestinya disita. Namun, kondisi itu tidak serta-merta membatalkan keseluruhan proses penggeledahan. “Akan tetapi, keadaan tersebut tidak serta merta menyebabkan keseluruhan penggeledahan termasuk terhadap uang, emas, dokumen, dokumen transaksi, dan benda lain yang secara rasional mempunyai kemungkinan hubungan dengan dugaan korupsi dan pencucian uang menjadi tidak sah,” ujar Richard.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut penyidik telah memperoleh sejumlah keterangan saksi sebelum penggeledahan yang menunjukkan

BARANG SITAAN TERKAIT KASUS FEBRIE ADRIANSYAH

Total nilai sitaan
Sekitar Rp476 miliar-Rp543 miliar.

- Emas batangan: 74 kilogram.
- Valuta asing dalam koper TUMI: - 4.443 lembar pecahan USD100. - 1.000 lembar pecahan SGD100.
- Uang tunai: ratusan miliar rupiah dalam Rupiah, dolar AS, dan dolar Singapura.
- Dokumen perkara: berkas yang diduga berkaitan dengan aliran dana korupsi batu bara PLTU, PT KNI, dan PT Asabri.
- Dokumen pribadi: sejumlah dokumen dan barang penunjang milik pribadi.
- Foto keluarga: figura foto keluarga turut disita dari rumah di Sentul.
- Lokasi penggeledahan: antara lain rumah Febrie di Sentul dan Kebayoran Baru.
- Penyidik: tim gabungan Polda Metro Jaya dan Kortastipidkor Polri.



adanya keterlibatan Febrie. Karena itu, keberatan mengenai prosedur penggeledahan dinilai tidak cukup untuk membuat seluruh tindakan penyidik menjadi tidak sah. “Tidak terbukti sebagai pelanggaran yang menyebabkan penggeledahan tidak sah,” kata hakim.

Penggeledahan pada awal Juli 2026 menjadi salah satu titik penting dalam perkara tersebut. Dari rangkaian penggeledahan, penyidik menemukan uang dan emas dalam jumlah besar. Salah satu barang bukti yang kemudian menjadi sorotan ialah 74 batang emas lantakan dengan total berat 74,01 kilogram. Hasil pemeriksaan PT Pegadaian menyatakan emas tersebut berkadar 23 karat. Penyidik juga memeriksa uang tunai senilai Rp6,059 miliar yang disita dalam perkara tersebut. (gus,ist,ant,kum/dya)